

ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 – 2022

Fuji Lestari¹, Fahrudin Zain Olilingo², Herwin Mopangga^{3*}

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Corresponding author e-mail : herwinmopangga@ung.ac.id

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknologi muncul tantangan terutama berkaitan dengan ketimpangan pada distribusi pendapatan diantara penduduknya. ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita dan masih menjadi isu penting untuk diatasi, dimana salah satu indikator makro yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan yaitu ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya ketimpangan pendapatan Kab/Kota, pengaruh jumlah penduduk, pengaruh indeks pembangunan manusia, pengaruh PDRB Perkapita terhadap ketimpangan pendapatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder pada tahun 2018-2022 bersumber dari data Badan Pusat Statistik. Model analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara garis besar Kab/Kota di Provinsi Gorontalo termasuk kategori sebagai ketimpangan rendah, hal ini dijelaskan pada variabel jumlah penduduk yang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, Distribusi Pendapatan

ABSTRACT

Along with technological advances, challenges arise, especially related to inequality in income distribution among the population. inequality in income distribution is a reality and is still an important issue to overcome, where one of the macro indicators that need attention in development is inequality in income distribution. This study aims to determine the magnitude of Regency / City income inequality, the effect of population, the effect of human development index, the effect of GRDP per capita on income inequality. The data used in this study are primary and secondary data in 2018-2022 sourced from data from the Central Bureau of Statistics. The analysis model in this study uses panel data regression. The results of the analysis show that in general, the Regency / City in Gorontalo Province is categorised as low inequality, this is explained by the population variable which has a positive but insignificant effect on income inequality. In addition, Human Development Index (HDI) has a negative but insignificant effect on income inequality and Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita has a positive and significant effect on income inequality.

Keywords: Income Inequality, Population, Income Distribution

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu fenomena sosial dan ekonomi yang menggambarkan perbedaan distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat atau daerah tertentu. Ketika ketimpangan pendapatan tinggi, sebagian kecil orang atau daerah memiliki pendapatan yang jauh lebih besar daripada mayoritas, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Tingginya ketimpangan pendapatan akan membuat pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Dampaknya, kesenjangan antara masyarakat dengan tingkat ekonomi yang baik (kelompok kaya) dan mereka yang berpendapatan rendah (kelompok miskin) akan semakin memperbesar (Amri, 2017). Ketimpangan pendapatan memiliki kaitan yang erat dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, termasuk Provinsi Gorontalo.

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi dan memiliki perbedaan yang beragam dalam hal geografi, demografi, dan ekonomi. Secara geografis, Provinsi Gorontalo memiliki pantai yang panjang, gunung yang menjulang, dan



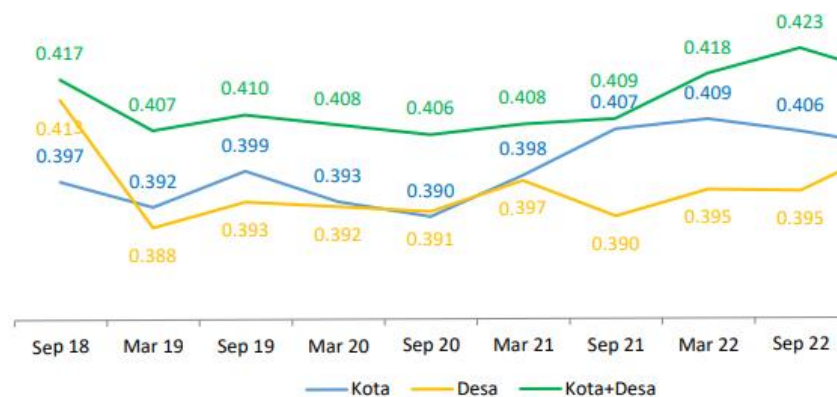
sumber daya alam yang kaya, termasuk hasil laut yang melimpah. Kondisi perekonomian di Provinsi Gorontalo masih terus berkembang. Pemerintah daerah terus berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai potensi ekonomi yang optimal. Pertumbuhan dalam perekonomian merupakan bagian penting dalam pembangunan di Indonesia. Selama ini pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi masih menjadi tujuan utama dalam rencana pembangunan nasional, karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan seperti ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Secara umum kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu pada angka minus 0,02 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perekonomian Gorontalo pada tahun 2022 mencapai peningkatan sebesar 4,04 persen dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,41 persen. Keadaan ini merupakan yang terburuk sepanjang sejarah pertumbuhan ekonomi Gorontalo dalam sepuluh tahun terakhir, dimana perekonomian Gorontalo sebelum tahun 2020 selalu berada diatas angka 6 persen. Merupakan hal yang umum bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah manapun termasuk Provinsi Gorontalo memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda - beda setiap tahunnya. Menurut Arham (2017) pertumbuhan ekonomi tinggi pun sesungguhnya tidaklah cukup, karena belum tentu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel makro ekonomi seperti ketimpangan distribusi pendapatan.

Dengan masuknya era globalisasi pada periode tahun 2018 – 2022, Provinsi Gorontalo mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi ini, juga muncul tantangan – tantangan baru, terutama berkaitan dengan ketimpangan pendapatan diantara penduduknya. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita dan masih menjadi isu penting untuk diatasi. Bank, (2015) berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan, ketimpangan didefinisikan untuk seluruh penduduk, bukan hanya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan saja. Dengan kata lain, permasalahan ketimpangan pendapatan daerah - daerah di Indonesia yang erat kaitannya dengan kemiskinan masih menjadi permasalahan penting yang perlu segera diatasi oleh pemerintah dan pihak – pihak berwenang.

Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang tidak lepas dari persoalan ketimpangan pendapatan, dimana hingga saat ini Provinsi Gorontalo masih menduduki urutan tertinggi kedua ketimpangan pendapatan se Indonesia dengan gini ratio sebesar 0,423 poin per September 2022. Di awal pembangunan di Provinsi Gorontalo, disparitas cenderung meningkat dan kemudian mengalami penurunan seiring dengan perubahan arah kurva ketimpangan pembangunan dalam teori Hipotesis Neo-Klasik (Mopangga, 2011). Salah satu indikator makro ekonomi yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan yakni ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dari gini ratio (Arham et al., 2021). Gini ratio merupakan salah satu alat untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan. Untuk melihat kondisi ketidakmerataan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo berikut disajikan data ketimpangan pendapatan melalui gini ratio Provinsi Gorontalo lima tahun terakhir.





Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Gambar 1. Gini Ratio Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa gini ratio Provinsi Gorontalo pada periode September 2018 sampai dengan September 2022 terus mengalami fluktuasi. Pada bulan September 2022, ketimpangan pendapatan di Provinsi Gorontalo saat ini mencapai 0,423 poin. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,005 poin dari Gini ratio pada Maret 2022 yang mencatat 0,418 poin, dan meningkat sebesar 0,014 poin dari Gini ratio pada September 2021 yang mencatat 0,409 poin.. Nilai gini ratio tertinggi terjadi pada tahun 2022 periode September sebesar 0,423 poin dan terendah terjadi pada tahun 2020 periode September yaitu sebesar 0,406 poin.

Indikator yang berperan dalam mempengaruhi ketimpangan adalah jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Ketiga indikator ini dianggap sebagai indikator ketimpangan pendapatan berdasarkan sejumlah pertimbangan yang mencerminkan berbagai aspek ketimpangan ekonomi dan sosial, dimana ketika ketiga indikator ini digunakan bersama – sama akan memberikan gambaran yang lengkap mengenai ketimpangan pendapatan dengan memungkinkan pelacakan aspek – aspek penting termasuk distribusi pendapatan, kesejahteraan sosial dan peluang ekonomi lainnya.

Indikator jumlah penduduk membantu menghitung pendapatan per kapita yang merupakan salah satu cara untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu jumlah penduduk merupakan faktor penting dalam mengukur ketimpangan, karena jika terjadi ketimpangan pendapatan yang besar antar kelompok penduduk yang besar maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan. Salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga dapat menyebabkan penurunan pendapatan perkapita (Arsyad, 2010). Indikator lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana tingkat tinggi atau rendahnya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas kerja penduduk. Produktivitas yang rendah akan mengakibatkan pendapatan yang juga rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya mencakup pendapatan, IPM juga memperhitungkan aspek – aspek yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya dalam hal pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang dapat menjadi permasalahan yang serius. Semakin tinggi indeks pembangunan manusia maka semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang pada akhirnya mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah indeks pembangunan



manusia maka semakin rendah pula tingkat produktivitas penduduknya sehingga produktivitas yang rendah dapat menyebabkan rendahnya pendapatan suatu daerah (Rahayu, 2018).

Indikator yang ketiga adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Meskipun PDRB merupakan indikator yang berguna untuk memahami ketimpangan pendapatan, penting untuk dicatat bahwa ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti distribusi pendapatan yang tidak merata, kesenjangan dalam akses terhadap pekerjaan yang menguntungkan, dan kesenjangan dalam akses ke layanan sosial seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketimpangan pendapatan seringkali tercermin dalam perbedaan PDRB per kapita antar wilayah, sehingga dapat membantu mengidentifikasi daerah – daerah yang mungkin memerlukan perhatian lebih dalam upaya mengurangi ketimpangan. PDRB perkapita dapat menjadi tolak ukur yang lebih baik karena dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah (Mahendra, 2019). Jika dilihat dari data dan dengan adanya kemajuan teknologi karena adanya era globalisasi membuat Provinsi Gorontalo mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun seiring dengan kemajuan teknologi tersebut muncul tantangan baru terutama berkaitan dengan ketimpangan pada distribusi pendapatan diantara penduduknya.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita dan masih menjadi isu penting untuk diatasi, dimana salah satu indikator makro yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan yaitu ketimpangan dalam distribusi pendapatan sehingga jika ketimpangan tinggi dapat menjadi penghambat pertumbuhan dalam perekonomian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan pembangunan ekonomi mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Gorontalo dan menganalisis pengaruh dari variabel atau indikator jumlah penduduk, IPM, dan PDRB per kapita terhadap ketimpangan pendapatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan dalam taraf hidup, standar hidup, dan pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat. Ketimpangan ini terjadi karena perbedaan dalam faktor produksi dan sumber daya yang tersedia di berbagai wilayah (Yuniarti et al., 2020). Dibandingkan dengan kemiskinan, ketimpangan pendapatan adalah konsep yang lebih luas dan mencakup semua orang, bukan hanya mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan saja. Ketimpangan pendapatan merujuk pada fenomena dimana pendapatan yang diperoleh oleh individu atau kelompok tidak merata.

Menurut Tambunan (2018), secara konseptual, ketimpangan pendapatan merujuk pada perbedaan pendapatan di antara individu-individu dalam satu wilayah atau daerah yang sama. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti variasi dalam kesempatan kerja, besaran upah atau gaji yang diterima, manfaat akses terhadap sumber pendapatan, tingkat pendidikan, kesehatan, akses informasi dan teknologi, serta kewajiban pajak terkait dengan jenis pekerjaan yang dilakukan baik di sektor publik maupun swasta. Selain itu, praktik diskriminasi berdasarkan gender, suku, agama, latar belakang pendidikan, dan faktor-faktor lainnya juga berperan dalam menciptakan ketimpangan pendapatan. (Hidayanti, 2016). Cita & Julianengsih (2019) berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat



pertumbuhan karena ketimpangan menyebabkan kebijakan retribusi pendapatan yang tentu saja memakan biaya besar.

Jumlah Penduduk

Teori Kuznets (Kuznets, 1955) *Curve* yang dikemukakan oleh ekonomi Simon Kuznets pada tahun 1955, dimana teori ini menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Menurut Hidayanti (2016) Jumlah penduduk merujuk pada total individu atau kelompok orang yang tinggal di suatu daerah atau wilayah yang sama. Penduduk didefinisikan sebagai individu yang tinggal dalam suatu daerah untuk jangka waktu yang lama. Jumlah orang yang tinggal di suatu tempat atau wilayah tertentu disebut sebagai penduduk. Penduduk, sebagai manusia, memiliki peran penting dalam ekonomi karena mereka merupakan tenaga kerja, ahli, pengusaha, dan pemimpin perusahaan.

Sebagai subjek ekonomi, penduduk memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah, apakah akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Jumlah dan kualitas penduduk di suatu daerah adalah faktor krusial yang mempengaruhi kapasitas produksi dan tingkat kesejahteraan di negara atau daerah tersebut. Namun, yang menjadi perhatian utama para ahli ekonomi adalah penduduk sebagai sumber tenaga kerja dan sumber daya manusia, selain sebagai sumber faktor produksi yang terampil (Rosyidi, 2002). Due et al., (1975) berpendapat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan jumlah penduduk dan menyebabkan penurunan pendapatan per kapita. Meskipun jumlah penduduk yang tinggi bukan penyebab utama keterbelakangan pembangunan, namun hal ini merupakan faktor yang berkontribusi terhadap lambatnya pembangunan ekonomi di negara tertentu maupun di suatu wilayah.

Dalam perekonomian suatu negara, ketika jumlah penduduk meningkat, pasti akan berdampak positif bagi Ekonomi suatu negara akan berkembang jika seluruh penduduknya memiliki pekerjaan dan pendapatan. Namun, kenyataannya setiap orang memiliki jenis pekerjaan yang berbeda, yang menghasilkan pendapatan yang bervariasi. Bahkan di tempat kerja yang sama, pendapatan tiap individu berbeda karena posisi pekerjaan menentukan besarnya pendapatan yang diterima. Semakin tinggi posisi jabatan seseorang, semakin besar pula penghasilannya. Perbedaan pendapatan inilah yang menjadi dasar terjadinya ketimpangan pendapatan di suatu daerah atau wilayah. (Sukma, 2021).

H1: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Gorontalo.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang membandingkan harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan, dan standar hidup di seluruh negara di dunia. IPM digunakan untuk mengkategorikan apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, serta untuk menilai dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Mokodongan & Santoso, 2022; Taharah, 2018). IPM memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan, di mana semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja (Taharah, 2018). Hal ini sejalan dengan teori Human Capital, yang menyatakan bahwa pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Galor & Tsiddon, 1997). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian suatu negara atau daerah dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia: harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang



layak. Menurut UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1990, indeks pembangunan sumber daya manusia dapat ditentukan menggunakan ukuran kuantitatif yang disebut dengan HDI (Human Development Index). HDI digunakan sebagai tolak ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konsisten. Indikator yang digunakan untuk mengukur HDI meliputi indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak (pendapatan).

Ketimpangan pendapatan memiliki hubungan erat dengan IPM. Hal ini sesuai dengan teori Human Capital, yang menyatakan bahwa pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembentukan modal manusia yang terlihat dari tingkat pendidikannya. Pendidikan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Jika setiap orang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, pendapatan mereka juga akan meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi penduduk akan bertambah. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan berkurang (Sulistyawati, 2015).

H2: Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Gorontalo.

PDRB Perkapita

Menurut Sukma (2021), PDRB dapat didefinisikan sebagai total nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah tersebut. Logaritma (2020) dalam Haykal (2022) menyatakan bahwa salah satu indikator penting untuk menilai kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDRB berdasarkan harga konstan (riil) digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau per sektor usaha dari tahun ke tahun. Selain itu, PDRB per kapita berdasarkan harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil per kapita penduduk di suatu daerah.

Pendapatan perkapita (PDRB Perkapita) adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Ini diperoleh dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya. PDRB Per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan atau pendapatan rata – rata penduduk yang tinggi (wikipedia, 2022). Menurut teori Kurva Kuznets Terbalik atau "Inverted-U Hypothesis of Income Inequality" tahun 1955, ketimpangan pendapatan akan meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi saat PDRB per kapita meningkat, karena pertumbuhan ekonomi yang cepat cenderung memberikan manfaat yang tidak merata kepada masyarakat. Namun, ketika suatu ekonomi mencapai titik tertentu dari perkembangannya, ketimpangan pendapatan akan mencapai puncaknya dan kemudian mulai menurun seiring dengan terus berkembangnya ekonomi.

PDRB di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan PDRB sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah, serta total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di daerah tersebut. PDRB per kapita, yang merupakan rata-rata pendapatan penduduk, bisa saja tinggi karena beberapa individu mungkin memiliki pendapatan yang sangat tinggi di daerah tersebut. Perbedaan



pendapatan antar sektor ekonomi ini kemudian dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. (Wasthutatya, 2022).

H3: PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Gorontalo

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angka-angka dan dianalisis menggunakan metode statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder dan primer. Kab/Kota Provinsi Gorontalo tahun 2018 – 2022 yang diperoleh dari Badan Pusat (BPS) Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan menggunakan gini ratio dan regresi data panel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gini Ratio

Menurut BPS dalam Hidayanti (2016) Gini Ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan. Gini ratio memiliki nilai antara 0 sampai 1. ketimpangan yang tinggi ditunjukkan dengan nilai gini ratio $>0,5$, sedangkan ketimpangan sedang ditunjukkan dengan nilai gini ratio $0,4$ sampai $0,5$, dan ketimpangan rendah ditunjukkan dengan nilai gini ratio $<0,4$.

Tabel 1. Gini Ratio Kab/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Gini Ratio				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Boalemo	0,37	0,37	0,36	0,39	0,38
Kabupaten Gorontalo	0,40	0,37	0,40	0,37	0,40
Kabupaten Pohuwato	0,35	0,39	0,37	0,40	0,38
Kabupaten Bone Bolango	0,34	0,37	0,35	0,35	0,38
Kabupaten Gorontalo Utara	0,40	0,38	0,40	0,39	0,42
Kota Gorontalo	0,37	0,36	0,36	0,40	0,38

Sumber : BPS-Susenas (diolah,2024)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa angka gini ratio Kab/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2018 - 2022 dihitung dengan menggunakan indeks Gini Ratio yaitu termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah yang ditunjukkan dengan angka Gini Ratio $<0,4$.

Pemilihan Model Regresi

Pada model regresi data panel, terdapat beberapa pengujian yang digunakan untuk menentukan model mana yang terbaik, apakah CEM, FEM, atau REM. Berikut adalah uji – uji yang dilakukan untuk pemilihan model regresi data panel:

- 1) Uji *Chow* digunakan untuk mengetahui pilihan model yang lebih baik digunakan, yakni antara CEM atau FEM.
- 2) Uji *Hausman* digunakan untuk mengetahui pilihan model yang lebih baik digunakan, yakni antara REM atau FEM.



- 3) Uji *Lagrange Multiplayer* (LM) digunakan untuk mengetahui pilihan model yang lebih baik digunakan, yakni antara CEM atau REM.

Tabel 2. Pemilihan Model

Pengujian	Hasil	Keputusan
<i>Uji Chow</i>	0.0000	< 0,05 (FEM Lebih baik dari CEM)
<i>Uji Hausman</i>	0.0963	> 0,05 (REM Lebih baik dari FEM)
<i>Uji LM</i>	0.0347	< 0,05 (REM Lebih baik dari CEM)

Catatan: ***) signifikan di 1%, **) signifikan di 5% dan *) Signifikan 10%, NS) Tidak Signifikan
Sumber: Data Diolah (E-Views), 2024

Berdasarkan pada Tabel 2 diatas hasil uji *Chow* didapatkan *p-value* sebesar 0.0000 dimana nilai *p-value* ini kurang dari nilai taraf signifikansi ($\alpha=0,05$) sehingga H1 diterima, hal ini berarti model yang lebih baik digunakan adalah **FEM**. Selanjutnya hasil uji *Hausman* didapatkan *p-value* sebesar 0.0963 dimana nilai *p-value* ini lebih dari nilai taraf signifikansi ($\alpha=0,05$) sehingga H0 diterima, hal ini berarti model yang lebih baik digunakan adalah **REM**.

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dilakukan karena pada uji *Hausman* model yang terpilih adalah REM, maka dilakukan pengujian lanjutan untuk menentukan model mana yang terbaik. Berdasarkan tabel 2, didapatkan nilai *p-value* sebesar 0.0347 dimana nilai *p-value* ini kurang dari nilai taraf signifikansi ($\alpha=0,05$) sehingga H1 diterima, hal ini berarti model yang lebih baik digunakan adalah **REM**. Sehingga keputusan yang diambil yaitu bahwa pada hasil penelitian ini menggunakan model **Random Effect Model** dalam mengestimasi data penelitian.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil dari estimasi model regresi dan pemilihan model data panel diatas, maka hasil analisis regresi data panel menggunakan *Random Effect Model* (REM). Output estimasi model REM disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. Output Estimasi REM

Variable	Coefficient	Prob.
C	0.394497	0.0012
JP	3.287925	0.6878^{NS}
IPM	-0.001349	0.4523^{NS}
PK	0.003175	0.0174^{**}
Random Effects (Cross)		
BOALEMO—C	0.001550	
BONBOL—C	-0.005028	
GORONTALO—C	-0.011457	
GORUT—C	0.027757	
KABGOR—C	0.004835	
POHUWATO—C	-0.017657	
R-squared	0.188297	
Adjusted R-squared	0.094639	
F-statistic	2.010478	
Prob(F-statistic)	0.137150	

Catatan: ***) signifikan di 1%, **) signifikan di 5% dan *) Signifikan 10%, NS) Tidak Signifikan
Sumber: Data Diolah (E-Views), 2024



Berdasarkan hasil output pada Tabel 3 dapat diketahui persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$GR = 0.394497 + 3.287925JP - 0.001349IPM + 0.003127PK$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa :

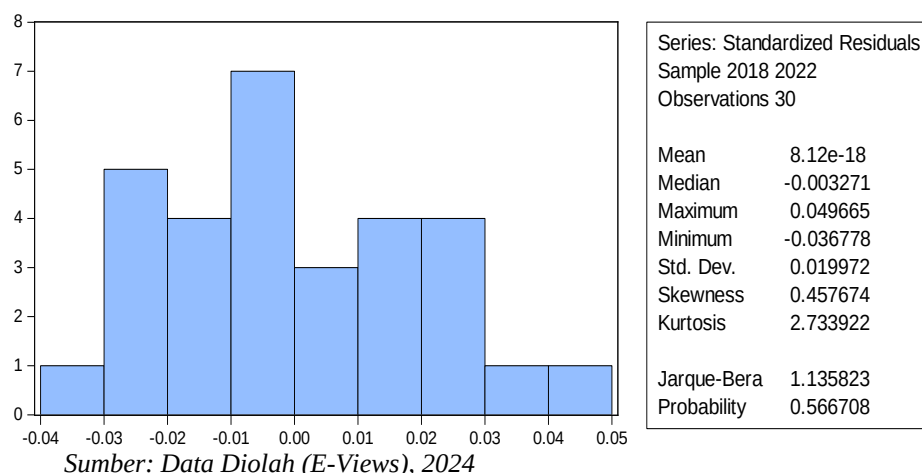
- 1) Ketimpangan Pendapatan tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun dalam model penelitian ini bernilai **0.394497** persen.
- 2) Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan. Artinya setiap peningkatan JP sebesar 1 persen maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar **3.287925** persen.
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan. Artinya setiap peningkatan IPM sebesar 1 persen maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar **-0.001349** persen.
- 4) PDRB Perkapita (PK) berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan. Artinya setiap peningkatan PK sebesar 1 persen maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar **0.003175** persen.

Uji Asumsi Klasik

Model yang baik juga harus sesuai dengan kriteria pengujian asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan bebas berdistribusi normal atau tidak. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan tingkat signifikansi dengan nilai Probabilitas *Jarque-bera* yang diperoleh dari hasil regresi.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data

Berdasarkan Gambar 2 diketahui nilai *Jarque-bera* sebesar 1.135823 dengan nilai probabilitas sebesar $0.566708 > \alpha (0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang tinggi atau yang sempurna antar variabel independen yang terdapat pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya.



Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	JP	IPM	PK
JP	1.000000	0.112159	0.048163
IPM	0.112159	1.000000	0.420424
PK	0.048163	0.420424	1.000000

Sumber: Data Diolah (E-Views), 2024

Dari tabel 4 hasil Pengujian diatas menunjukkan bahwa nilai Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada nilai korelasi yang tinggi antara variabel bebas yang melebihi 0,90 (Ghozali, 2012). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk memeriksa apakah model persamaan regresi terdapat ketidaksamaan residual periode pengamatan. Jika nilai prob nya $< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian sedangkan jika nilai prob $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESASB		
Variable	Coefficient	Prob.
C	0.028927	0.7113
JP	-1.747702	0.7630
IPM	0.000207	0.8704
PK	-0.001012	0.2707

Sumber: Data Diolah (E-Views), 2024

Berdasarkan tabel 5 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan seluruh nilai probabilitas variabel *independen* lebih besar dari taraf signifikan 0.05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis Statistik

Uji ini untuk mengetahui apakah variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model regresi. Pengujian ini terdiri dari tiga langkah, yaitu koefisien determinasi (R^2), F-Statistik, dan uji parsial (t-statistik)

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi independent menerangkan dengan baik variabel dependen dengan koefisien determinasi 0 sampai 1 dengan simbol R^2 ($0 < 1$). Jika R^2 semakin mendekati 1 (satu), maka semakin erat hubungannya dengan variabel dependen.

Tabel 6. Tabel Hasil Uji Determinasi (R^2)

<i>R-squared</i>	0.188298
<i>Adjusted R-squared</i>	0.094640

Sumber: Data Diolah (E-Views), 2024



Berdasarkan tabel 6 diketahui nilai *Adjusted R-squared* sebesar **0.094640** atau **09,46** persen. Sehingga keputusan yang diambil yakni bahwa variabel JP, IPM, dan PK dapat menjelaskan variabel ketimpangan pendapatan sebesar **9,46** persen. Sedangkan sisanya sebesar **90,54** persen dijelaskan oleh variabel lain diluar pengamatan penelitian.

Uji F-Statistik

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel – variabel independen secara bersama – sama signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji F

<i>F-Statistic</i>	2.010487
<i>Prob(F-Statistic)</i>	0.137149

Catatan: ***) signifikan di 1%, **) signifikan di 5% dan *) Signifikan 10%, NS) Tidak Signifikan Sumber: Data Diolah (E-Views), 2024

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa Nilai *F-Statistic* sebesar **2.010487** dan prob. *F-Statistic* (**0.137149**) lebih dari taraf signifikan. Oleh karena itu, diputuskan bahwa variabel bebas secara bersama - sama tidak mempengaruhi variabel terikat.

Uji T-Statistik

Uji t dilakukan untuk menghitung koefisien regresi secara individual, dari uji t dapat diketahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh signifikan statistik atau tidak terhadap variabel terkait. Dengan cara sama dengan uji F, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dengan kesimpulan variabel bebas tersebut memiliki hubungan signifikan statistik variabel terkait (Widarjono, 2013).

Tabel 8. Output Uji T

Variable	Coefficient	Prob.
C	0.394497	0.0012
JP	3.287925	0.6878^{NS}
IPM	-0.001349	0.4523^{NS}
PK	0.003175	0.0174^{**}

Catatan: ***) signifikan di 1%, **) signifikan di 5% dan *) Signifikan 10%, NS) Tidak Signifikan Sumber: Data Diolah (E-Views), 2024

- Jika H_0 diterima dan H_1 ditolak = Signifikan
- Jika H_0 ditolak dan H_1 diterima = Tidak Signifikan

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa :

1) Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa Nilai Koefisien JP sebesar **3.287925** dan nilai p (*Prob*) untuk variabel adalah sebesar **0.6878**. Nilai $p\text{-value}$ yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikan (10%) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, keputusannya adalah JP berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap Ketimpangan Pendapatan dalam kurun waktu 2018-2022.

2) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa Nilai Koefisien IPM sebesar **-0.001349** dan nilai p (*Prob*) untuk variabel adalah sebesar **0.4523**. Nilai $p\text{-value}$ yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikan (10%), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.



Dengan demikian, keputusannya adalah IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap Ketimpangan Pendapatan dalam kurun waktu 2018-2022.

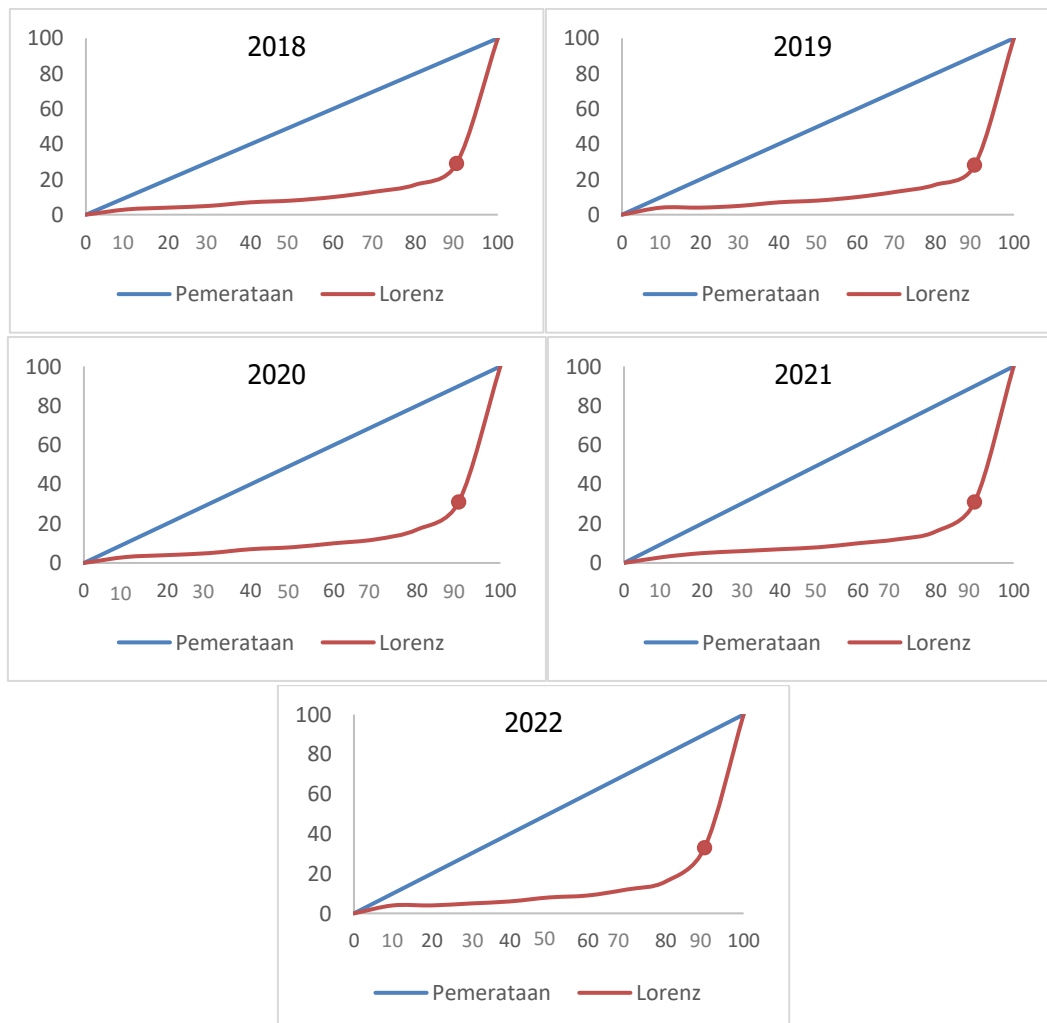
3) Pengaruh PDRB Perkapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa Nilai Koefisien PK sebesar **0.003175** dan nilai p ($Prob$) untuk variabel adalah sebesar **0.0174**. Nilai p -value yang diperoleh lebih kecil dari taraf signifikan (5%) sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, keputusannya adalah PK berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Ketimpangan Pendapatan dalam kurun waktu 2018-2022.

Pembahasan

Gini Ratio Kab/Kota di Provinsi Gorontalo

Secara garis besar angka gini ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2018 – 2022 termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan sedang, hal ini digambarkan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo yang memiliki gini ratio 0,4 – 0,5. Dimana Gini Ratio tertinggi terdapat pada Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2022 sebesar 0,42 dan tingkat ketimpangan terendah terdapat pada Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 sebesar 0,34. Untuk lebih jelas lagi dilihat dari grafik kurva Lorenz yang menggambarkan ketimpangan pendapatan Provinsi Gorontalo.



Sumber : data diolah (BPS-Susenas)

Gambar 3. Kurva Lorenz Provinsi Gorontalo



Dapat dilihat pada gambar 4.3 Kurva Lorenz Provinsi Gorontalo tahun 2018 – 2022 menunjukkan bahwa Kurva Lorenz semakin jauh dari garis diagonal atau garis pemerataan, dimana dapat dilihat semakin cembung kurva Lorenz artinya semakin timpang. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin jauh Kurva Lorenz dari diagonal, ini menunjukkan peningkatan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan atau semakin tinggi tingkat ketidaksetaraan pendapatan. Dimana berdasarkan kurva Lorenz diatas pada tahun 2018, 90% penduduk menerima 29% pendapatan. Kemudian setelah kurva Lorenz bergeser pada tahun 2019 - 2022, 90% penduduk menerima 28% - 33% pendapatan. Sehingga dapat disimpulkan distribusi pendapatan Provinsi Gorontalo tahun 2018 – 2022 sangat tidak merata karena separuh penduduk hanya mendapat bagian yang sangat kecil dari pendapatan daerah.

Bantika et al., (2015) dalam Haykal (2022), Dikatakan bahwa sumbu mendatar (horizontal) menunjukkan persentase kumulatif penduduk, sementara sumbu vertikal menunjukkan persentase total pendapatan yang diterima oleh setiap persentase penduduk. Diagonal di tengah disebut "garis pemerataan sempurna." Semakin jauh kurva Lorenz dari diagonal ini, semakin tinggi tingkat ketidaksetaraan. Sebaliknya, semakin dekat kurva Lorenz ke diagonal, semakin merata distribusi pendapatannya.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan nilai koefisien sebesar **3.287925** dan nilai *p-value* sebesar **0.6878** $> \alpha$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan 1% Jumlah Penduduk dapat menaikkan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo sebesar **3.287925**. Pengujian hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo.

Hal diatas dikatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dimana meskipun Jumlah Penduduk meningkat, dampaknya terhadap Ketimpangan Pendapatan tidak cukup besar untuk dianggap signifikan secara statistik, artinya pertumbuhan penduduk tidak sepenuhnya menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan di Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak selalu mempengaruhi ketimpangan pendapatan, ini bisa berarti bahwa meskipun penduduk bertambah, dampaknya terhadap distribusi pendapatan di Provinsi Gorontalo tidak signifikan.

Hal ini mungkin karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Gorontalo yang lebih dominan daripada hanya jumlah penduduk, seperti distribusi pekerjaan, tingkat pendidikan, kebijakan pemerintah, atau faktor-faktor ekonomi lainnya. Penting untuk memperhatikan bahwa walaupun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik, hal ini tidak berarti bahwa jumlah penduduk tidak memiliki dampak sama sekali. Ini hanya berarti bahwa dalam konteks analisis statistik yang dilakukan, efeknya tidak dianggap cukup besar untuk dianggap signifikan secara statistik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Kuznets Curve* yang dikemukakan oleh ekonomi Simon Kuznets pada tahun 1955 (Kuznets, 1955), dimana teori ini menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Dalam konteks jumlah penduduk yang berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, artinya peningkatan jumlah penduduk di daerah yang sedang berkembang dapat memperburuk ketimpangan pendapatan, terutama jika distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi tidak merata. Ini sesuai dengan fase



awal dari teori Kuznets *Curve* di mana pertumbuhan ekonomi yang cepat dan urbanisasi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan sebelum mencapai titik balik di mana ketimpangan pendapatan mulai menurun seiring dengan pembangunan ekonomi yang lebih lanjut. Hasil riset ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Putri (2021) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk memberikan dampak yang positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera selama periode tahun 2013 hingga 2020.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan nilai koefisien sebesar **-0.001349** dan nilai *p-value* sebesar **0.4523** $> \alpha$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan 1% IPM dapat menurunkan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo sebesar **0.001349**. Pengujian hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo.

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan menunjukkan bahwa meskipun ada keterkaitan antara IPM dengan Ketimpangan Pendapatan tetapi keterkaitan tersebut tidak berarti untuk dianggap signifikan. Hal ini dinyatakan bahwa meskipun IPM memiliki pengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan yang artinya jika semakin tinggi IPM maka akan semakin rendah tingkat Ketimpangan Pendapatan, efek tersebut tidak cukup besar atau konsisten secara statistik untuk dianggap signifikan. Dengan kata lain, hubungan antara IPM dan Ketimpangan Pendapatan mungkin ada, tetapi tidak berarti untuk secara signifikan mempengaruhi tingkat Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi dari Asman et al., (2024) dan Sholikhah & Imaningsih, (2022) Penelitian ini menemukan bahwa IPM memiliki dampak negatif terhadap ketimpangan, di mana peningkatan pendidikan formal berhubungan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Temuan ini sesuai dengan teori Human Capital, yang menegaskan bahwa pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas pendapatan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Secara spesifik, peningkatan IPM diharapkan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, sementara penurunan IPM dapat mengakibatkan peningkatan ketimpangan pendapatan.

Pengaruh PDRB Perkapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah Variabel PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan nilai koefisien sebesar **0.00000317** dan nilai *p-value* sebesar **0.0174** $< \alpha$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan 1% PDRB Perkapita dapat menaikkan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo sebesar **0.00000317**. Pengujian hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo.

PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo menandakan bahwa adanya korelasi yang kuat antara PDRB Perkapita dengan tingkat Ketimpangan Pendapatan dan korelasi ini dianggap signifikan secara statistik. Dalam hal ini bahwa semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah di Provinsi Gorontalo, maka akan semakin tinggi pula tingkat Ketimpangan Pendapatan di daerah tersebut karena



pertumbuhan ekonomi yang cepat akan cenderung memberikan manfaat yang tidak merata kepada masyarakat. Artinya, peningkatan dalam PDRB Perkapita secara signifikan berkontribusi pada peningkatan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori "Kurva Kuznets Terbalik" atau "Inverted-U Hypothesis of Income Inequality" tahun 1955 (Kuznets, 1955). Menurut teori Kurva Kuznets Terbalik, ketimpangan pendapatan akan meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi saat PDRB per kapita meningkat, karena pertumbuhan ekonomi yang cepat cenderung memberikan manfaat yang tidak merata kepada masyarakat. Contohnya peningkatan pendapatan hanya didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu yang terjadi dalam sektor – sektor seperti industri, pertanian komersial atau sektor pariwisata yang dimiliki atau dikuasai oleh segelintir orang atau perusahaan. Akibatnya, pendapatan dari sektor – sektor ini lebih banyak mengalir ke tangan kelompok elit atau pemilik modal, sementara masyarakat lainnya, seperti petani kecil atau pekerja informal mungkin tidak mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Hal ini yang akhirnya dapat mengakibatkan ketidaksetaraan atau kesenjangan ekonomi di antara kelompok masyarakat.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taharah (2018) yang menyatakan bahwa PDRB Perkapita memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di DI Yogyakarta selama periode tahun 2009 hingga 2015.

PENUTUP

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Analisis Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo tahun 2018 – 2022, maka peneliti mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Gini Ratio atau Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2018 – 2022 termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah, hal ini digambarkan oleh angka Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo sebesar $<0,4$ (Tingkat Ketimpangan Rendah).
2. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan, artinya setiap peningkatan 1% Jumlah Penduduk dapat menaikkan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo sebesar 3.287925.
3. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan, artinya setiap peningkatan 1% IPM dapat menurunkan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo sebesar 0.001349.
4. PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan 1% PDRB Perkapita dapat menaikkan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Gorontalo sebesar 0.003175.

Berdasarkan kesimpulan yang dibahas diatas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan potensi daerah untuk mewujudkan peningkatan ekonomi serta lebih memperhatikan pemerataan dengan melakukan pembangunan bukan hanya pada daerah yang terpusat namun juga dapat menjangkau daerah – daerah terpencil sehingga roda perekonomian dapat bergerak seimbang di setiap Kab/Kota dengan tujuan pencapaian kesejahteraan pada seluruh golongan



masyarakat mengingat kesenjangan pendapatan ini merupakan masalah yang serius yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintah harus mempunyai regulasi yang mengatur penduduk yang ada di Provinsi Gorontalo untuk dapat meningkatkan kualitas penduduk sehingga seiring dengan menciptakan penduduk yang berkualitas maka pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Dimana hal tersebut dapat melatih kemampuan dan keahlian penduduk non produktif sehingga mereka dapat memiliki pendapatan dan merasakan kesejahteraan.
3. Pemerintah diharapkan dapat memberi lebih banyak edukasi mengenai pentingnya pendidikan dalam hidup manusia terhadap daerah-daerah yang tertinggal. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat yang berada di daerah tertinggal kurang dalam memperhatikan pendidikan padahal pendidikan sendiri merupakan salah satu jalan agar seseorang dapat terbebas dari lingkaran setan kemiskinan dan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
4. Pemerintah diharapkan memberi perhatian lebih terhadap usaha-usaha kecil yang didirikan oleh masyarakat yang apabila diberi perhatian lebih maka usaha tersebut pun akan menjadi berkembang. Dengan berkembangnya usaha-usaha yang didirikan oleh masyarakat pun nantinya dapat menyerap banyak tenaga kerja. Dengan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan perkapita serta diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 1(1), 1–11. <http://journal.lembagakita.org>
- Arham, M. A. (2017). *Mengapa Ketimpangan Distribusi-Pendapatan Cenderung Tinggi.pdf*.
- Arham, M. A., Mopangga, H., & Isa, R. (2021). *Analisis gini ratio kabupaten pohuwato. December 2021*.
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. In *Upp Stim Ykpn. Yogyakarta* (5th ed.). Upp Stim Ykpn. Yogyakarta.
- Asman, J. R., Arham, M. A., & Akib, F. H. Y. (2024). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sulawesi. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 76–83. <https://doi.org/10.37905/jsep.v1i3.23491>
- Bank, T. W. (2015). *Meluasnya Ketimpangan di Indonesia*. The World Bank. <https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>
- Bantika, V., Benu, O. L. S., & Kapantow, G. H. M. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara. *Cocos*, 6(17), 1–33.
- Cita, F. P., & Julianengsih, E. (2019). *Analisis ketimpangan pendapatan di provinsi ntb 1*. 01(01), 38–43.
- Due, J. M., Adelman, I., & Morris, C. T. (1975). Economic Growth and Social Equity in Developing Economies. In *ASA Review of Books* (Vol. 1). Stanford University Press. <https://doi.org/10.2307/532535>



- Galor, O., & Tsiddon, D. (1997). The Distribution of Human Capital and Economic Growth. *Journal of Economic Growth*, 2(1), 93–124. <https://doi.org/10.1023/A:1009785714248>
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <https://books.google.co.id/books?id=JdqJAQAACAAJ>
- Haykal, A. O. (2022). *Analisis Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat*.
- Hidayanti, N. (2016). *Pengaruh PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Penduduk Miskin, Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2021*. 1–23.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28. <http://www.jstor.org/stable/1811581>
- Mahendra, A. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 3(1), 113–138. <https://doi.org/10.54367/jrak.v3i1.443>
- Mokodongan, J. G., & Santoso, I. R. (2022). Analysis of Affecting Factors Human Development Index in The Region Bolaang Mongondow Raya. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 3(1), 42–49.
- Mopangga, H. (2011). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Trikonomika*, 10(1), 40–51.
- Rahayu, Y. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 2(1), 165. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.40>
- Rahman, R., & Putri, D. Z. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(3), 37. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i3.12368>
- Sholikah, N. R., & Imaningsih, N. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2021. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 10(3), 247–253. <https://doi.org/10.26740/jupe.v10n3.p247-253>
- Sukma, S. M. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019*.
- Taharah, S. (2018). *Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2015*.
- Wasthutatya, Y. (2022). *Analisis Ketimpangan Pendapatn Antar Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2012-2021*.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika*. In *UPP STIM YKPN*. Yogyakarta.
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169–176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>

